

# **POLA KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM MEWUJUDKAN DESA DIGITAL (Studi Kasus di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat)**

**Hadi Muhammad Rizal<sup>1</sup>, Azis Taufik Hirzi<sup>2</sup>, Rita Gani<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung, Indonesia

\*email: [hadimuhammadrizal92@umbandung.ac.id](mailto:hadimuhammadrizal92@umbandung.ac.id)

---

## **ABSTRACT**

**Kata Kunci:**  
*Political  
Communication;  
Government;  
Digital Village.*

*Technological developments in the current era are experiencing very rapid development along with global technological advances that have affected all aspects of life both in the fields of economy, politics, arts and culture, education and so on. Technological progress is something that cannot be avoided in this life. No exception for rural communities, the Digital Village Program is an effort of the West Java provincial government in order to develop the potential that exists in the village and empower rural communities to take an active role in order to increase their potential. Furthermore, the final target of this digital village is to make it a means of communication interaction between the government and the community, and also to make it a channel for political communication. If that happens, the pattern of political communication in West Java will become a very new and unique pattern of political communication in Indonesia. Including Cibiru Desa Wetan already doing Launching Digital Village, this being one example of the pattern of political communication conducted by the West Java provincial government in realizing the digital village. This study aims to determine and examine the pattern of political communication with empowerment values in the context of village progress in general in West Java. In addition, this study wants to examine what political communication is being pursued by the West Java provincial government, Cibiru Wetan Village is one of the many digital villages that have been launched and has uniqueness and advantages from other villages.*

---

---

*The research method used in this study is a qualitative method with a case study approach. The paradigm used is constructivism and data collection techniques are carried out through interviews, observations, literature and document studies. The theory used is Social Contrusion, Symbolic Interaction Theory.*

---

**Kata Kunci:**

*Komunikasi politik;  
Pemerintah;  
Desa Digital.*

**ABSTRAK**

---

Perkembangan teknologi pada era saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi yang global telah berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan baik bidang ekonomi, politik, seni budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Tidak terkecuali untuk masyarakat desa, Program Desa Digital merupakan upaya pemerintah provinsi Jawa Barat dalam rangka mengembangkan potensi yang ada di desa serta pemberdayaan masyarakat desa untuk ikut berperan aktif dalam rangka meningkatkan potensi yang dimiliki. Selanjutnya bahwa target akhirnya dari desa digital ini adalah menjadikan sarana interaksi komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, dan tidak luput juga menjadikan salah satu saluran untuk komunikasi politik. Jika itu terjadi maka pola komunikasi politik di Jawa Barat menjadi pola komunikasi politik yang sangat baru dan unik di Indonesia. Termasuk Desa Cibiru Wetan yang sudah melakukan Launching Desa Digital, ini menjadi salah satu contoh pola komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan desa digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pola komunikasi politik dengan nilai-nilai pemberdayaan dalam rangka kemajuan desa secara umum di Jawa Barat. Selain itu, penelitian ini ingin mengkaji komunikasi politik apa yang diupayakan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat, Desa Cibiru Wetan merupakan salah satu dari sekian desa digital yang sudah Launching dan memiliki keunikan serta keunggulan dari desa-desa yang lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Paradigma yang digunakan yaitu konstruktivisme dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi literatur dan dokumen. Adapun teori yang digunakan yaitu Kontrusi Sosial, Teori Interaksi Simbolik

---

## PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi pada saat ini menjadikan beberapa sektor masuk pada proses digitalisasi dalam rangka mempermudah segala aktifitas kehidupan manusia dari proses pemanfaatan teknologi tersebut. Dan seterusnya teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan berbagai perubahan terutama di bidang ilmu komunikasi dan ilmu politik. Media konvensional sebagai representasi primer ilmu komunikasi massa yang selama ini berpusat dalam dominasi kekuasaan dan modal tertentu, kini diimbangi kehadiran aplikasi teknologi baru seperti media sosial dan aplikasi lainnya.

Perkembangan teknologi ini pula harus bisa dimanfaatkan oleh seluruh manusia agar menghadirkan nilai-nilai positif dalam pemanfaatan teknologi tersebut agar bisa menekan nilai-nilai yang negatif dari pengaruh teknologi tersebut, salah satunya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kaitan memanfaatkan teknologi pada saat ini menghadirkan program desa digital untuk desa-desa yang ada di Jawa Barat selain memanfaatkan teknologi juga dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang ada di desa tersebut.

Program desa digital merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjangkau seluruh masyarakat yang ada dipelosok, dan memberikan pelayanan yang mumpuni bagi seluruh masyarakat yang ada di Jawa Barat. Tentu komunikasi menjadi salah satu tombak dari hal tersebut, sehingga diharapkan desa digital menjadi sarana komunikasi politik Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bisa melakukan interaksi dan memberikan informasi kepada masyarakat di seluruh Jawa Barat. Tentu media sosial dimanfaatkan untuk menjangkau secara geografis dan waktu sehingga harapannya menghadirkan peran pemerintah di masyarakat dari perkotaan hingga perdesaan.

Salah satu desa yang sudah masuk dalam desa digital yaitu ada desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung yang sudah masuk dalam program desa digital di kawasan desa digital Jawa Barat, desa Cibiru Wetan merupakan desa yang masuk dalam kawasan desa digital di Jawa Barat dalam kaitan kali ini merupakan salah satu desa digital yang ada di Jawa Barat masuk dalam kawasan desa digital Cileunyi yang mana ada tiga desa yang masuk dalam kawasan tersebut yakni Desa Cibiru Wetan, Desa Cinunuk dan Desa Cileunyi Wetan.

Ketiga desa tersebut merupakan kawasan desa digital yang ada di Kabupaten Bandung, di Kabupaten Bandung baru ada tiga desa digital dan masuk dalam kawasan desa digital tersebut, bisa ditelusuri bahwa ketiga desa ini memiliki intensitas aktif dalam memanfaatkan teknologi dalam aktifitas kemasyarakatan yang ada di desa tersebut. Sehingga sangat wajar dan sudah tepat jika desa tersebut menjadi desa digital.

Selain itu pula, pemerintah desa Cibiru Wetan selalu aktif dalam mengisi website desa upaya menginformasikan segala aktifitas yang akan dan yang sudah dilakukan oleh desa Cibiru Wetan, mengaktifkan media sosial agar masyarakat ikut dan mengetahui kegiatan yang dilakukan, mengaktifkan beberapa sektor penunjang kegiatan desa lainnya seperti karang taruna, radio komunitas, tv komunitas dan lain sebagainya. Serta aplikasi-aplikasi lain dalam rangka mempermudah komunikasi masyarakat dengan

pemerintah dan lain sebagainya untuk menunjang dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Berbicara tentang Desa Cibiru Wetan, yang menjadi ketertarikan lainnya adalah Desa Cibiru Wetan merupakan salah satu desa terbaik yang ada di Jawa Barat dengan beberapa inovasi serta percepatan program yang dilakukan oleh pemerintah desanya. Selain itu, Desa Cibiru Wetan pada akhir bulan September tahun ini mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Publik Nasional masuk kepada 10 desa terbaik perihal keterbukaan informasi publik juga disusul dengan penghargaan-penghargaan lainnya sehingga Desa Cibiru Wetan menjadi salah satu desa terbaik di Jawa Barat.

Beberapa penghargaan serta menjadi salah satu desa terbaik di Jawa Barat, Desa Cibiru Wetan ini menjadi unik ketika melihat dari masyarakat yang ada di Desa Cibiru tersebut. Jika dilihat, Desa Cibiru ini merupakan desa yang penduduknya dari aspek pendidikan sebagian masyarakatnya kebanyakan tidak melanjutkan kejenjang lebih tinggi, namun ada upaya dorongan dari pemerintah desa untuk meleak teknologi dan informasi sehingga komunikasi dan informasi dari pemerintah diketahui oleh masyarakatnya. Masyarakat sendiri sangat antusias dengan terlibat aktif juga dalam pembangunan desa dengan kata lain pendidikan masyarakat tidak menjadi patokan akhir jika adanya keinginan perubahan besar, sehingga sangat wajar jika Desa Cibiru Wetan menjadi salah satu desa terbaik di Jawa Barat.

Pada hari rabu 02 Juni 2021 Desa Cibiru Wetan resmi menjadi desa digital dikukuhkan dengan soft launching Kawasan desa digital Jawa Barat tahun 2021 yang bersama Desa Cinunuk serta Desa Cileunyi Wetan, kegiatan soft launching ini langsung dihadiri oleh ketua Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat, dalam kegiatan ini mengukuhkan Desa Cibiru Wetan menjadi desa digital.

Diharapkan dengan kegiatan launching ini menjadikan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat bergotong royong mengembangkan dan meningkatkan potensi desa yang menjadi sebuah keunggulan didesa tersebut. Serta diharapkan desa cibiru wetan ini menjadi salah satu desa percontohan untuk desa lainnya yang mana secara khusus kabupaten Bandung baru memiliki 1 (satu) kawasan desa digital.

Munculnya gagasan desa digital ini melihat kondisi Jawa Barat sendiri yang memiliki kawasan secara geografis sangat luas dan besar, terlebih Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang besar di Indonesia dengan padat secara kependudukan. Sehingga langkah untuk menggerakkan masyarakat untuk meleak teknologi dalam rangka mempermudah mengakses segala informasi, mempermudah dan menciptakan peluang serta lain sebagainya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan. Dan lebih terpenting diharapkan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di setiap desanya agar desa bisa sama-sama berkembang.

Konsep desa digital ini secara sederhana adalah untuk menekan angka kesenjangan perkotaan dan perdesaan terkait akses internet dan akses teknologi agar perdesaan dan perkotaan sama-sama maju serta berkembang. Juga dalam kaitan ini desa digital diharapkan menjadi salah satu jalan untuk menekan permasalahan komunikasi, komunikasi politik dan lain sebagainya agar seluruh masyarakat di Jawa Barat bisa mengakses informasi yang ada, dan menekan informasi yang tidak valid atau hoax.

Tentu menjadi sebuah inovasi gaya komunikasi pemerintah yang saat ini dikolaborasikan dengan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga informasi dan komunikasi politik pemerintah dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terhalang jarak dan waktu. Tentu kita mengetahui bahwa kebiasaan sebelum adanya teknologi seperti saat ini, masyarakat akan mendapat informasi melalui media massa seperti radio, majalah, koran, televisi dan lainnya. Tentu membutuhkan waktu dan kondisi yang sudah ditentukan oleh pelaku media massa itu sendiri, berbeda dengan kehadiran teknologi saat ini yang mana tidak ada batas waktu dan juga tidak terbatas. Atau dengan kata lain percepatan informasi dan komunikasi sangat cepat, kita akan mengetahui kejadian yang baru saja terjadi melalui alat menunjang teknologi itu sendiri.

Namun percepatan teknologi ini, selain cukup mampu mengatasi tiga permasalahan yang dipaparkan di atas juga meneguhkan fenomena konvergensi media dengan teknologi informasi. Bahkan dalam tataran praktis, dari media siber ini akan tercipta pula virtual community, yakni masyarakat maya yang memiliki karakter interaksi hampir sama masyarakat nyata, hanya saja mereka tidak memiliki struktur dan pola komunikasi konvensional serta kontrol sangat kecil ke sesama anggota komunitas tersebut.

Virtual Community ini terbangun dari jaringan-jaringan sosial yang dibuat oleh komunitas itu sendiri, dengan ranah mereka antara lain media sosial, blog, dan aplikasi Internet lainnya. Menariknya komunitas ini tidak bisa ditentukan demografi dan geografinya, sebab identitas mereka adalah hak privasi mereka sendiri. Mengacu kehadiran masyarakat "baru" ini tentu akan menjadi sarana dan target komunikasi politik yang bisa disebut dengan politik siber. Jika pada era lalu aktivitas pemasaran politik dilakukan manual, tatap muka, dan sebagainya. Maka pada saat ini kita semua menjadi saksi bahwa aktivitas politik telah banyak berkutat di ranah siber dalam membangun kesadaran politik bagi masyarakat.

Media sosial dan atau media digital berperan penting dalam reformasi birokrasi dan control manajemen. Hal ini berkaitan pula dengan keefektifan penggunaan media digital bagi kepala daerah. Kontrol manajemen dapat terbantu dengan penggunaan media digital sebagai sebuah fasilitas. Seorang pemimpin tidak mungkin dapat mengawasi keadaan di lingkungan pemerintahnya setiap saat. Keberhasilan pengawasan tersebut membutuhkan kerja sama dari masyarakat untuk dapat turut mengawasi. Melalui media digital permasalahan tersebut dapat sedikit teratasi karena warga akan melapor kepada pimpinan berkenaan dengan masalah ditangani dengan lebih cepat dan tepat.

Menurut Alex Sobur dalam Mimbar (2000:118→) bahwa komunikasi politik sebagai layaknya darah mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan, protes, dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke jantung (pusat) pemrosesan sistem politik dan hasil pemrosesan itu yang tersimpul dalam fungsi-fungsi put-put dialirkan kembali oleh komunikasi politik yang selanjutnya menjadi feedback sistem politik begitulah komunikasi politik menjadi sistem politik itu hidup dan dinamis. Informasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di dunia saat ini, terlebih jika kita tinggal dalam suatu negara demokrasi yang mengenal adanya pengakuan terhadap kebebasan dalam memperoleh informasi bagi rakyatnya. Tertutupnya kebebasan dalam memperoleh informasi dapat berdampak pada banyak hal

seperti rendahnya tingkat pengetahuan dan wawasan warga negara yang pada akhirnya juga berdampak pada rendahnya kualitas hidup suatu bangsa.

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang terbesar di Indonesia juga tidak bisa lepas dari pengaruh perkembangan teknologi tersebut, salah satu upaya dalam mengubah tata cara pelaksanaan pemerintahan dengan pendekatan e-governance ialah dengan menjadikan teknologi digital sebagai sarana dan prasarana untuk pelayanan dan penyampaian informasi kepada masyarakat di Jawa Barat. Salah satu contohnya adalah media sosial yang digunakan oleh pemerintah Jawa Barat untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat diantaranya adalah media sosial yang akrab dengan masyarakat seperti facebook, twitter, Instagram dan sebagainya.

Konsep Jabar Digital ialah konsep Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang bercita-cita mewujudkan #JabarJuara yakni Jawa Barat yang berbasis data dan teknologi, dalam rangka mendukung pelayanan masyarakat dan pengambilan kebijakan yang responsif, adaptif, dan inovatif dengan pendekatan digital dan memiliki misi untuk mewujudkan pengambilan kebijakan berdasarkan data; mengakselerasikan transformasi digital pemerintahan; dan mempermudah kehidupan masyarakat dengan teknologi digital (Ramdhani, 2018).

Mengacu pada program yang dirancang oleh pemerintah provinsi Jawa Barat terlebih khusus oleh Gubernur Jawa Barat yakni ada 9 (sembiliah) program prioritas dari pemerintah provinsi Jawa Barat. Sembilan program prioritas pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa: 1). Akses Pendidikan untuk semua, 2). Desentralisasi layanan Kesehatan, 3). Partumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, 4). Pengembangan destinasi dan infrasutruktur pariwisata, 5). Pendidikan agama dan tempat ibadah juara, 6). Infrastruktur konektivitas wilayah, 7) Gerakan membangun desa, 8). Subsudi gratis golekmah (golongan ekonomi lemah), 9). Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Dari 9 (Sembilan) program prioritas pemerintah Provinsi Jawa Barat yang lebih tertarik kepada program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) yang memfokuskan pembangunan desa agar ketimpangan perdesaan dan perkotaan tergerus. Terlebih provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang besar yang ada di Indonesia sudah menjadi tantangan besar yang akan dihadapi untuk meningkatkan perdesaan, sehingga program ini harus didukung dari berbagai lini dan seluruh stakeholder yang terkait termasuk masyarakat Jawa Barat tentunya.

Program desa digital ini merupakan perluasan terobosan yang Ridwan Kamil pernah diterapkan di Kota Bandung saat Ridwan Kamil menjadi Walikota Bandung menggabungkan komunikasi politik pemerintah dengan digital, yang artinya Ridwan Kamil mengharapkan desa digital ini menjadi salah satu saluran komunikasi politik pemerintah dengan seluruh masyarakat di Jawa Barat hingga pelosok-pelosok agar adanya kesamaan pemahaman yang pada akhirnya membangun interaksi tanpa batas antara masyarakat dengan pemerintah Jawa Barat.

Selain itu pula, program desa digital ini upaya pemerintahan Provinsi Jawa Barat terlebih khusus Ridwan Kamil yang merangkul Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat untuk membangun desa yang ada di Jawa Barat dengan meningkatkan di bidang teknologi dalam rangka menumbuhkan bidang-bidang lain yang

dengan dorongan teknologi menjadi percepatan yang sesuai dengan harapan. Agar desa-desa di Jawa Barat bisa meningkatkan potensi yang desa mereka miliki dengan percepatan-percepatan melalui teknologi.

Desa digital merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjangkau seluruh masyarakat yang ada dipelosok, dan memberikan pelayanan yang mumpuni bagi seluruh masyarakat yang ada di Jawa Barat. Tentu komunikasi menjadi salah satu tombak dari hal tersebut, sehingga diharapkan desa digital menjadi sarana komunikasi politik Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bisa melakukan interaksi dan memberikan informasi kepada masyarakat di seluruh Jawa Barat. Tentu media sosial dimanfaatkan untuk menjangkau secara geografis dan waktu sehingga harapannya menghadirkan peran pemerintah di masyarakat dari perkotaan hingga perdesaan.

Terlebih lagi bahwa konsep Desa Digital Jawa Barat sudah mendapatkan penghargaan tingkat internasional di pertengahan tahun 2020 yakni, Desa Digital terpilih sebagai "Digital Equity and Accessibility" dalam ajang IDC Smart City Asia Pacific Awards 2020 dan Jawa Barat menjadi salah satu daerah di Indonesia yang mendapat penghargaan tersebut.

Mengingat perkembangan teknologi yang kian pesat pada saat ini sehingga program desa digital merupakan program yang harus bisa menjadi sebuah alternatif dalam rangka memanfaatkan teknologi dan internet sehingga dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari bisa diarahkan kepada teknologi tersebut, digitalisasi desa merupakan harapan yang elegan mengingat masih ada kawasan di Jawa Barat yang masuk kepada zona tidak ada akses internet. Sehingga program desa digital merupakan langkah baik untuk mengikis beberapa permasalahan diatas tadi.

Tentu setiap program memiliki alur dan standar pelaksanaan serta operasional terkala ingin masuk kedalam program desa digital tersebut, hal tersebut bisa disampaikan dan dipublikasikan kepada khalayak agar program desa digital ini menjadi saran diskusi publik dalam rangka mempublikasikan apa yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan program-programnya.

Berbicara soal mewujudkan desa digital tentu komunikasi pemimpin yang mempengaruhi pencapaian dan penyelesaian program tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan suatu wadah atau organisasi, organisasi pemerintahan diperlukan peranan pimpinan yang dapat fleksibel dan inovatif. Pemimpin merupakan kemampuan dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin secara sukarela, karena pemimpin daerah memiliki political leadership yang menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah atau daerah tersebut. Menurut Lord & Maher (dalam Raharjo dan Nafisah, 2006), seorang menjadi pemimpin karena dipersepsikan oleh pihak lain sebagai pemimpin. Pemimpin adalah obyek persepsi, apakah akan dipersepsi sebagai mengorganisasikan dan menafsirkan informasi yang diterimanya.

Komunikasi sangat berhubungan erat dengan kepemimpinan karena tujuan komunikasi adalah salah satu proses untuk mencapai kesamaan makna atau maksud. Kesamaan ini dimaksudkan untuk mengurai atau meminimalis terhadap salah persepsi dari tujuan yang akan dicapai. Salah satu mengefektifkan komunikasi yang dibangun

pastinya memiliki cara atau strategi untuk meminimalis terjadinya noise dalam komunikasi yang dibangun untuk mencapai tujuan.

Tentu tantangan besar ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata, dalam pengwujudan desa digital tersebut dibutuhkan dukungan secara penuh dari berbagai pihak, masyarakat, aparatur pemerintah dan stakeholder-stakeholder yang lainnya. Sehingga Ridwan Kamil melakukan komunikasi politik dengan beberapa stakeholder yang berkaitan dengan digitalisasi dalam rangka bekerjasama untuk mewujudkan desa digital ini.

1) Bagaimana proses interaksi dan strategi komunikasi politik pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan desa digital itu? 2) Bagaimana pengelolaan pesan dan media komunikasi dalam mewujudkan desa digital? 3) Bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun citra diri dalam mewujudkan desa digital? 4) Mengapa melakukan program desa digital di Jawa Barat?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman objek yang diteliti secara mendalam khususnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya mewujudkan desa digital dengan tindakan komunikasi politik. Selain itu realitas sosial yang diperoleh selama dilapangan dan masalah yang ditemukan akan dikaitkan dengan konsep maupun teori untuk mengembangkan pemahaman akan suatu fenomena yang dihadapi.

Penelitian kualitatif memiliki waktu yang cukup lama, karena tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan, dan bukan sekedar pembuktian hipotesis seperti dalam penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2003:25). Penelitian kualitatif memiliki hasil akhir yang bukan hanya sekedar menghasilkan data atau informasi, tetapi mampu menghasilkan yang bermakna bahkan hipotesis atau ilmu baru yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan taraf hidup manusia (Sugiyono, 2005:18).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus tunggal, esensi studi kasus yaitu menjelaskan keputusan tentang mengenai kasus yang dipilih dan menjelaskannya secara komprehensif baik dalam ruang lingkup individu, kelompok, organisasi, program atau situasi sosial (Yin, 2013:2). Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subyek yang diteliti. Studi kasus menggunakan berbagai metode seperti wawancara, pengamatan, penelaahan dokumen, survei dan data apa pun untuk menguraikan suatu kasus

secara terinci. Jadi alih-alih menelaah sejumlah kecil variable dan memilih sampel besar yang mewakili populasi secara seksama dan dengan berbagai cara mengkaji sejumlah besar variable mengenai suatu kasus khusus.

Yin (2013:1-12) mengemukakan bahwa pendekatan studi kasus dapat digunakan untuk penelitian yang berupa perencanaan baik perencanaan wilayah, administrasi umum, kebijakan umum, ilmu-ilmu manajemen dan pendidikan. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupannya dan kekuatan yang unik dari studi kasus adalah kemampuannya untuk berhubungan sepenuhnya dengan berbagai jenis bukti baik dokumen, peralatan, wawancara dan observasi.

Dalam karakteristik utama dalam studi kasus ini adalah: Fokus pada satu atau beberapa kasus, dipelajari dalam konteks kehidupan nyata, menjelaskan hubungan sebab akibat, pengembangan teori dalam fase desain penelitian, tergantung pada berbagai sumber bukti dan menggeneralisasikan teori. Menurut Yin (2009:48), metode penelitian studi kasus merupakan strategi yang tepat untuk digunakan dalam penelitian yang menggunakan pokok pertanyaan penelitian *how* atau *why*, sedikit waktu yang dimiliki peneliti untuk mengontrol peristiwa yang diteliti, dan fokus penelitiannya adalah fenomena kontemporer, untuk melacak peristiwa kontemporer. Pada metode studi kasus, peneliti fokus kepada desain dan pelaksanaan penelitian.

Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan atau epistemologis yang Panjang (Mulyana, 2003:9)

Dalam penulisan penelitian ini paradigma yang digunakan penulis adalah paradigma konstruktivis, paradigma ini merupakan antithesis terhadap paham yang menempatkan pentingnya pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas ilmu pengetahuan. Secara ontologism, aliran ini menyatakan bahwa realitas itu ada dalam beragam bentuk konstruksi mental yang didasarkan pada pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik, serta tergantung kepada pihak yang melakukannya.

Paradigma konstruktivis memandang ilmu sosial, sebagai analisis sistematis terhadap "socially meaningful action" melalui pengamatan langsung

dan terperinci terhadap pelaku sosial dalam kehidupan sehari-hari yang wajar atau alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Komunikasi politik ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagaimana interaksi dan strategi komunikasi politik yang dibangun, pesan seperti apa yang disampaikan, media apa yang menjadi alat penyampaian pesan tersebut dan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun citra di Jawa Barat itu sendiri. Akan menjadikan pola komunikasi politik dalam upaya mewujudkan desa digital di Desa Cibiru Wetan secara khusus menjadi model pengwujudan desa digital di Jawa Barat.

### **Proses Interaksi dan Strategi Komunikasi Politik**

Strategi komunikasi politik memerlukan media yang cukup penting posisinya, media juga berpengaruh besar pada strategi komunikasi politik dijalankan, pada skala umumnya penggunaan media pemerintah dalam melakukan strategi komunikasi politik sama dengan pemerintah lainnya melalui birokrasi yang ada didalam pemerintahan itu sendiri, melalui birokrasi tersebut informasi dan interaksi yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Barat menggunakan sistem birokrasi dari pemerintahan atas kepada pemerintahan bawahnya dan desa menjadi pelaksana program tersebut.

Selain media, interaksi dan strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan komunikasi politik juga perlu menentukan target segmen, tidak terkecuali oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat segmen digunakan untuk menentukan titik komunikasi politik dalam melakukan strategi komunikasi politik, kelemahan dan kekuatan dari khalayak yang akan diberikan suatu informasi akan pula menentukan keberhasilan proses interaksi dan strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Adapun interaksi yang digunakan dan strategi yang terjadi dalam pelaksanaan pengwujudan desa digital secara umum dan secara khusus dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat yang mewakili peran pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan kaitannya dengan program desa digital.

Dalam melakukan komunikasi politik tentu memiliki beberapa aktor, karena komunikasi berjalan pada dua arah. Tidak terlepas pula dalam prinsip

komunikasi yang memerlukan komunikator atau aktor komunikasi untuk menyampaikan pesan, makna, propaganda, kepada komunikan penerima pesan tersebut, makna dan propaganda tersebut. Komunikator memegang komunikasi politik dalam komunikasi politik terdapat beberapa aktor atau komunikator atau juga bisa disebut lakon komunikasi yang membuat komunikasi politik ini berjalan.

Aktor ini sangat berperan vital dalam melakukan komunikasi politik menentukan jalan atau tidaknya program desa digital ini, sampai atau tidaknya pesan yang dikehendaki, yang berhasil atau tidaknya program desa digital ini. Secara garis besar Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Barat merupakan bagian dari aktor komunikasi politik pemerintahan Provinsi Jawa Barat

Mengubah orientasi masyarakat berdasarkan apa yang sudah dilakukan bukan kesamaan ideologis. Masyarakat lebih menilai kemudian memilih terhadap pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah nasional, seperti ekonomi, sosial, politik dan budaya (Firmanzah, 2007:162)

Interaksi komunikasi pemerintah kepada eksternal dimaksudkan untuk mengirim informasi publik (public information) oleh administrator/aparatur kepada masyarakat dan sektor swasta (private sector) atau sektor bisnis (business sector) dan mengakomodasi opini publik (public opinion) dari masyarakat dan sektor bisnis, ini penting dalam era demokratisasi dan desentralisasi atau otonomi daerah dan good public governance (kepemimpinan sektor publik yang baik). Oleh karena good public governance menekankan ada tiga pilar atau pelaku yaitu: pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dan ketiga pilar tersebut membangun kemitraan, maka masyarakat dan sektor privat juga menempati posisi penting dalam proses komunikasi pemerintahan. Dengan kata lain, partnership antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dapat berjalan efektif jika proses komunikasi di antara ketiganya juga berjalan efektif.

Pemerintah melakukan komunikasi interaksi sosial dengan melakukan tatap muka dalam kegiatan seminar, rapat dan sebagainya dalam rangka mensosialisasikan program desa digital ini, komunikasi yang dilakukan akan berlanjut sampai kepada tahap implementasi dan pengembangan desa digital sehingga terwujudnya desa digital yang mandiri kepada tahap desa digital 4.0. Komunikasi secara tatap muka ini dilakukan dalam upaya menjelaskan dan menyamakan persepsi mengenai desa digital tersebut merupakan program yang mudah dan program yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan potensi dan taraf kehidupan masyarakat yang ada di desa.

Djokopurwanto (2006:21) dalam Rosmawaty (2010:73) menjelaskan bahwa komunikasi adalah komunikasi yang dilakukan antara orang dengan orang lain dalam masyarakat maupun organisasi dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan Bahasa yang mudah dipahami (informal) untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan penjelasan tersebut bahwa pemerintah melakukan komunikasi yang melibatkan banyak orang atau lebih dari dua orang dengan tatap muka pada suatu kegiatan tertentu dan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak baku sehingga dapat dipahami oleh khalayak. Dalam pelaksanaan tersebut pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan interaksi dalam upaya mewujudkan desa digital di Cibiru Wetan.

Interaksi adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya. Gillin dan Gillin mengajukan dua syarat yang harus dipenuhi agar suatu interaksi itu mungkin terjadi yaitu: 1) adanya kontak Sosial (Social contact), 2) adanya komunikasi. Bisa dilihat dari proses interaksi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan desa digital ini memiliki kedua unsur tersebut.

Pertama, pemerintah provinsi Jawa Barat melakukan kontak sosial yang mana kontak sosial merupakan tahap pertama terjadinya interaksi, dapat dikatakan bahwa untuk terjadinya suatu kontak tidak harus terjadi secara badaniah seperti arti semula kata kontak itu sendiri yang secara harfiah berarti "Bersama-sama menyentuh", manusia sebagai individu dapat mengadakan kontak tanpa menyentuhnya tetapi sebagai makhluk sensoris dapat melakukannya dengan berkomunikasi. Komunikasi ataupun face to face communication, interpersonal communication, juga melalui media didukung kemajuan teknologi komunikasi yang maju pesat.

Kontak sosial berlangsung dalam tiga bentuk, yakni tidak hanya antara individu dan individu sebagai bentuk pertamanya saja, tetapi juga dalam bentuk kedua, antara individu dan suatu kelompok manusia atau sebaliknya, bentuk ketiga antara sesuatu kelompok manusia dengan kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Suatu kontak sosial tidak hanya tergantung dari Tindakan ataupun kegiatan saja, tetapi juga dari tanggapan atau response reaksi, juga feedback terhadap Tindakan atau kegiatan tersebut.

Kontak sosial dapat bersifat positif, apabila mengarah kepada suatu Kerjasama (cooperation). Dan dapat bersifat negatif apabila mengarah kepada suatu pertentangan (conflict), atau bahkan lama sekali tidak menghasilkan suatu interaksi. Penggolongan lainnya adalah suatu kontak sosial dapat bersifat primer

atau sekunder apabila pihak-pihak yang mengadakan kontak dapat langsung bertemu dan berhadapan muka, hal itu dikatakan bersifat primer. Sedangkan apabila dalam kontak itu diperlukan suatu perantara yang dapat berupa orang-perorangan atau media, dikatakan kontak tersebut bersifat sekunder.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan kontak sosial dengan berbagai unsur dalam rangka mewujudkan desa digital yang mana kontak sosial ini dibentuk dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mana dibangun dengan kerjasama yang mana melibatkan banyak orang, banyak bidang dan banyak pemikiran untuk mencapai tujuan bersama dalam hal ini ada program desa digital.

Kedua, pemerintah provinsi Jawa Barat melakukan komunikasi dalam upaya mewujudkan desa digital ini, interaksi didasari oleh komunikasi dalam artinya yang benar dan konkrit dan nyata, interaksi itu adalah komunikasi itu sendiri, seperti telah lama dinyatakan oleh John Dewey: "society not only continues to exist by transmissions, by communication, but it may fairly be said to exist in transmission, in communication".

Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya mewujudkan desa digital ini dilakukan dengan mengadakan seminar atau webinar, rapat dan pertemuan, diskusi dan lain sebagainya dalam rangka menyamakan persepsi mengenai desa digital sehingga dalam pengadaannya desa digital ini bisa mempermudah dalam pelaksanaan desa digital ini.

Ellis (1994) mengungkapkan gagasan serupa bahwa strategi komunikasi adalah keterampilan prosedural yang digunakan pembelajar untuk mengatasi kekurangan kosa kata mereka. Sehingga apa yang disampaikan harus menyesuaikan dengan kondisi para penerima pesan tersebut agar persepsi yang dibawa dari pesan tersebut tersampaikan kepada penerima dengan baik.

Hal ini dipertegas Cohen (2004) bahwa strategi komunikasi adalah upaya sistematis oleh pembelajar untuk mengekspresikan makna dengan bahasa target dimana aturan bahasa target yang sistematis belum terbentuk. Artinya bagaimana bahasa bisa diterima oleh penerima pesan sehingga bisa diterima oleh penerima pesan dengan baik serta persepsi yang diharapkan bisa terkendalikan sesuai apa yang direncanakan.

Sehingga bisa dipastikan bahwa strategi komunikasi politik pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya mewujudkan desa digital di Jawa Barat dan secara khusus di Desa Cibiru Wetan menggunakan strategi komunikasi politik yang efektif, yang artinya bahwa pemahaman, persepsi dan target yang ingin

dicapai disampaikan dengan jelas dan juga tuntas sehingga penerimaan pesan yang ingin disampaikan kepada komunikan tersampaikan dengan seutuhnya.

Pengelolaan pesan dan pemilihan media komunikasi

Pesan-pesan yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan pesan ajakan dan publikasi yang mana mengenai pelaksanaan desa digital dan perkembangan program desa digital ini, sehingga desa-desa yang belum melakukan digitalisasi di desanya bisa tergerak untuk melaksanakan desa digital ini. Menurut Cartee dan Copland (Venus, 2019:99) *campaign message is the most often thought of influence in changing attitudes*, atau secara umum pesan merupakan aspek penting memberikan rangsangan dalam merubah perilaku seseorang.

Program pemerintah Provinsi Jawa Barat memang bukan hanya desa digital namun desa digital diberikan posisi yang sangat prioritas terlebih dari keadaan dunia yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja dengan hadirnya virus Covid-19 yang menyerang masyarakat secara mendunia sehingga mempengaruhi perilaku masyarakat yang terbiasa melakukan kegiatan secara langsung atau tatap muka harus melakukannya dengan secara dalam jaringan. Hal tersebut semakin mendorong pemerintah melakukan percepatan dalam pelaksanaan desa digital karena adanya keperluan masyarakat dalam hal teknologi dan internet.

Berbicara mengenai pengelolaan pesan tentu Teknik pengelolaan pesan komunikasi merupakan sebuah kunci bagaimana pesan yang diharapkan bisa tersampaikan kepada penerima pesan sehingga apa yang diharapkan dari pesan tersebut seutuhnya diterima oleh penerima pesan sesuai yang diharapkan. Adapun Teknik pengelolaan pesan komunikasi menurut Cassandra dalam Cangara (2004:111) bahwa terdapat dua model penyusunan pesan, yakni penyusunan pesan yang bersifat informatif dan penyusunan pesan yang bersifat persuasif.

Penyusunan pesan yang bersifat informatif merupakan model penyusunan pesan yang bersifat informatif lebih banyak ditujukan pada perluasan wawasan dan kesadaran khalayak. Prosesnya lebih banyak bersifat difusi atau penyebaran, sederhana, jelas dan tidak banyak menggunakan jargon atau istilah-istilah yang kurang populer di kalangan khalayak. Yang artinya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan pesan berkaitan dengan desa digital menggunakan bahasa yang bersifat informatif dan juga jelas dalam penjelasan mengenai desa digital tersebut.

Ada empat macam penyusunan pesan yang bersifat informatif, yakni: 1) Space order (penyusunan pesan yang melihat kondisi tempat atau ruang, seperti internasional, nasional, dan daerah. Penyusunan pesan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat menyesuaikan dengan daerah yang artinya menyesuaikan dengan penerima pesan yang ada di daerah-daerah. 2) Time Order (penyusunan pesan berdasarkan waktu atau periode yang disusun secara kronologis, dimana pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusun beberapa waktu dalam hal publikasi, penyampaian pesan menyesuaikan dengan bagaimana kegiatan yang dilakukan kaitannya dengan sosialisasi dan sebagainya. 3) Deductive order (penyusunan pesan melalui dari hal-hal yang bersifat umum kepada khusus). 4) Inductive Order (penyusunan pesan yang dimulai dari hal-hal khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Model penyusunan pesan informatif banyak dilakukan dalam penulisan berita dan artikel oleh para wartawan dengan memakai model piramid.

Menurut Cangara (2004:113) bahwa terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam penyusunan pesan yang memakai Teknik persuasi, antara lain: 1). Fear Appeal, metode penyusunan pesan dengan menimbulkan rasa ketakutan kepada khalayak. 2). Emotional Appeal, cara penyusunan atau penyampaian pesan dengan berusaha menggugah emosional khalayak. 3). Reward Appeal, cara penyusunan atau penyampaian pesan menawarkan janji-janji kepada khalayak. 4). Motivational Appeal, Teknik penyusunan pesan yang dilakukan bukan karena janji-janji, tetapi disusun untuk menumbuhkan internal psikologis khalayak sehingga mereka dapat mengikuti pesan-pesan itu. 5). Humoris Appeal, Teknik penyusunan pesan yang dilakukan dengan humor, sehingga penerima pesan khalayak tidak merasa jenuh.

Menurut David V.J. Bell (dalam Nimmo, 2009) terdapat tiga jenis pembicaraan yang mempunyai kepentingan politik, antara lain: 1) pembicaraan kekuasaan merupakan pembicaraan yang memengaruhi orang lain dengan ancaman atau janji. Bentuknya yang khas adalah pernyataan. Kunci pembicaraan kekuasaan adalah ketika seorang menjabat mempunyai kemampuan untuk mewujudkan janji dan ancaman. Ancaman dan janji terletak di kutub yang bertentangan serta berbeda. Berdasarkan penelitian, banyak janji adalah bohong dan kebohongan adalah kekerasan yang disampaikan secara halus dan lembut. 2) pembicaraan pengaruh merupakan yang mempengaruhi orang lain dengan nasihat, dorongan, permintaan dan peringatan. Kuncinya pembicaraan pengaruh adalah bagaimana si pembicara berhasil memanipulasi persepsi atau harapan orang lain terhadap kemungkinan mendapat untung atau rugi. Janji dan ancaman

yang merupakan alat tukar pada komunikasi atau pembicaraan kekuasaan, pada pembicaraan pengaruh, alat-alat tersebut bisa diganti dengan nasihat, dorongan dan permintaan dengan kata lain pembicaraan pengaruh lebih bersifat ajakan, tetapi dalam batasan yang wajar. 3) pembicaraan otoritas adalah pemberian perintah. Penguasa yang sah adalah suara otoritas dan memiliki hak untuk dipatuhi.

Dalam proses dan Tindakan komunikasi politik, pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai komunikator mengemas dan mengirimkan bentuk pesa yang berbeda karena pola pikir, nilai, belief system, tujuan, bahkan ideloginya yang berbeda, semua faktor tersebut mengarahkan perilaku seseorang muncul dalam interaksi komunikasi politik yang berlangsung. Schacter "komunikasi adalah suatu mekanisme yang mampu menimbulkan kekuatan/kekuasaan (dalam Sendjaja, 1994).

Pengelolaan pesan ini diharapkan menjadi sebuah langkah sosialisasi kepada masyarakat serta seluruh aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan peranan untuk terlibat aktif dalam pengimplementasian desa digital tersebut sehingga program desa digital ini berjalan secara lancar namun memberikan dampak seperti apa yang direncanakan. Pesan-pesan yang sering disampaikan merupakan pesan yang mendorong untuk pengimplementasian program sehingga program bisa dirasakan oleh masyarakat serta keterlibatan peran pemerintah ikut berperan aktif dalam pelaksanaan program tersebut

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memproduksi dan mengelola pesan tidak hanya sekedar, karena teks atau pesan dalam proses dan tindakan politik tidak bisa hanya dinilai sebagai teks tanpa makna. Hal itu bisa dinilai melalui bahasa dan teks yang dikonstruksi, komunikator terutama yang mempunyai kekuasaan dengan leluasa dapat membahasakan sebuah realitas atau seseorang baik atau buruk. Artinya hampir tidak ada realitas yang hampa dan kosong semuanya mengandung kekuasaan dan kepentingan tertentu, sebagaimana kecenderungan sumber informasi atau komunikator. Pesan politik yang mungkin menyudutkan seseorang atau kelompok tertentu merupakan bagian dari kekuatan politik yang dimiliki seseorang/kelompok.

Kekuatan tersebut semakin besar dan massif dengan adanya dukungan media. Dukungan media juga menjelaskan dan mempertegas keberpihakan media terhadap sebuah kasus. Hal tersebut terjadi karena media sebagai industry yang mempunyai kepentingan ekonomi dan politik harus memelihara situasi stabil atau status quo, walaupun dikemas atas alasan dan kepentingan tertentu.

Alvin Toffler (dalam Raharjo, 2011) menyebutkan era baru dewasa ini dengan *The Third Wave* atau gelombang ketiga, yang artinya menegaskan saat ini peradaban manusia telah memasuki era bahwa fungsi informasi menjadi jauh lebih penting daripada era sebelumnya. Pada era baru ini telah muncul media baru seperti internet. Rahardjo (2011) mengatakan bahwa keberadaan media baru tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang begitu pesat.

Dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih media sebagai bentuk saluran pesan yang akan disampaikan kepada penerima pesan melihat dari beberapa hal dan melakukan dengan beberapa kegiatan, sehingga pesan yang disampaikan diharapkan diterima dengan baik oleh penerima pesan. Kegiatan yang dilakukan tentu karena bersifat birokrat pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kegiatan seperti sosialisasi dan kegiatan rapat bersama agar program ini dipahami dan diterima oleh para pemerintah yang dibawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, hal ini dilakukan karena ada beberapa hal yang bersinggungan dengan peraturan yang berlaku kepada desa.

Secara formal pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kegiatan rapat, seminar, sosialisasi dan lain sebagainya yang bersifat formal, dengan mengundang beberapa orang yang ahli dalam bidang yang terkait dengan desa digital, juga para perwakilan dari beberapa akademisi agar memberikan pandangan dan masukan terkaitan program desa digital ini.

Kekuatan media sosial untuk mempengaruhi masyarakat didasarkan secara eksklusif pada aspek sosialnya, ini berarti interaksi dan partisipasi yang dapat dilakukan melalui kampanye sebagai bagian dari proses komunikasi politik dengan khalayak. Kampanye merupakan penyampaian pesan dari pengirim kepada khalayak. Layanan jaringan sosial yang khas dapat berbagi konten komunitas web, dan forum internet media sosial. Sejauh penggunaan media sosial melalui platform yang ada di media sosial.

#### Membangun Citra

Berbicara mengenai citra adalah dunia menurut persepsi kita, atau *pictures in our head* (water Lippman, 1965) yang merupakan gambaran tentang realitas, mungkin saja-tidak sesuai dengan realitas. Citra terbentuk berdasarkan informasi yang diterima melalui berbagai media, utamanya media massa cetak dan elektronik yang bekerja membentuk, mempertahankan atau mendefinisikan citra. Dari sudut pandang ilmu sosial, salah satu pendekatan teoritik tentang pencitraan citra adalah *impression management* manajemen kesan – dimana

citra dipandang sebagai kesan seseorang atau suatu organisasi terhadap orang atau organisasi lain.

Program desa digital ini merupakan salah satu bentuk dari pencitraan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mana muncul dari program yang digaungkan oleh pemimpin pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan dari target dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diusung pada saat ini yakni salah satunya Jabar Digital, bisa dipastikan bahwa citra yang ingin dibangun adalah digitalisasi untuk masyarakat Jawa Barat.

Selain itu juga, sudah menjadi sebuah rahasia umum bahwa Ridwan Kamil sebelum menjadi Gubernur Jawa Barat, merupakan Walikota Bandung yang membuat gebrakan mengenai pengimplementasian teknologi di kota Bandung, juga sebagai kepala daerah dia juga sangat indetik dengan media sosial sebagai salah satu sarana untuk berinteraksi dengan masyarakat Kota Bandung bahkan diluar Kota Bandung karena indikatornya adalah pengikut media sosial Ridwan Kamil kala itu yang masih menjadi Walikota Bandung.

Indetik dekat dengan media sosial itu menjadikan beberapa berubah dalam rangka pemanfaatan teknologi dalam rangka peningkatan pelayanan dan informasi serta masukan dari masyarakat. Sehingga setelah menjadi Gubernur Jawa Barat hal-hal yang diterapkan di Kota Bandung ingin diluaskan kepada masyarakat Jawa Barat. Salah satunya adalah program desa digital ini, harapannya adalah masyarakat bisa mengakses informasi dan komunikasi dengan pemerintah, sehingga tidak ada lagi terhalang birokrasi, namun secara administrasi tidak diabaikan.

Menurut Nimmo (1978) citra adalah segala hal yang berkaitan dengan situasi keseharian seseorang, menyangkut pengetahuan, perasaan dan kecenderungannya terhadap sesuatu. Sehingga citra dapat berubah seiring dengan perjalanan waktu. Teori image building menyebutkan bahwa, citra akan terlihat atau terbentuk melalui proses penerimaan secara fisik (panca indra), masuk ke saringan perhatian (attention filter), dan dari situ menghasilkan pesan yang dapat dilihat dan dimengerti (preserved message), yang kemudian berubah menjadi persepsi dan akhirnya membentuk citra (M. Wayne De Lozier, 1976:44).

Dalam pencitraan terdapat dua elemen dasar yakni: 1) positioning, seperti apakah pelaku politik ditempatkan dalam pikiran penerima pesan politik. Konsep ini bisa diartikan sebagai sebuah hubungan yang dibuat oleh perusahaan antara produk yang dihasilkan dengan segmen khusus di pasar (Newman, 1999:45). Ries & Trout (2002:3) mendefinisikan "positioning" sebagai menempatkan produk dalam pikiran konsumen. Meski begitu, positioning bukanlah sesuatu

yang dilakukan terhadap produk itu sendiri, melainkan menempatkan produk itu dalam pikiran calon konsumen. 2) Memory bagaimana kesan terhadap pelaku politik di hold dalam pikiran penerima pesan politik. Manusia pada hakekatnya adalah cognitive miser (pelit mengalokasikan sumber daya kognitifnya) dan kerap menyeleksi informasi yang ingin disimpan dalam memori, hanya hal-hal yang dinilai penting olehnya yang disimpan, sedang lainnya dibuang. Apalagi dalam dunia yang dipenuhi oleh pesan-pesan komunikasi (overcommunicated society), manusia memiliki semacam mekanisme yang disebut "oversimplified mind" dimana pikiran hanya menyerap pesan-pesan yang dianggapnya tidak terlalu rumit dan sederhana.

Persuasi pada prinsipnya adalah setiap Tindakan komunikasi yang ditunjukkan untuk mengubah atau memperteguh sikap, kepercayaan dan perilaku khalayak secara sukarela sehingga sejalan dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Onong Uchjana Effendy (2002:25) mengemukakan beberapa Teknik komunikasi persuasif yakni 1) Teknik asosiasi. Penyajian pesan komunikasi dengan cara menumpangkan suatu objek atau peristiwa yang menarik perhatian khalayak. 2) Teknik integrasi. Kemampuan komunikator untuk menyatu dengan komunikan. Artinya dengan pendekatan verbal atau nonverbal, komunikator menempatkan dirinya merasakan hal yang sama dengan komunikan, 3) Teknik ganjaran. Mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan iming-iming atau reward dari komunikator kepada komunikan. 4) Teknik tataran. Menyusun pesan dengan secermat mungkin agar menarik, enak didengar atau dibaca dan pada akhirnya akan menggiring khalayak bertindak seperti yang diinginkan komunikator. 5) Teknik Red-herring. Seni seorang komunikator untuk meraih kemenangan dalam perdebatan dengan mengelakkan argumentasi yang lemah untuk kemudian mengalihkannya sedikit demi sedikit ke aspek yang dikuasainya guna dijadikan senjata ampuh dalam menyerang lawan. Teknik itu digunakan komunikator ketika dalam keadaan terdesak.

Tentu upaya ini tidaklah mudah perlu ada keterlibatan berbagai element dari berbagai aspek untuk bisa sebagaimana semestinya. Karena pekerjaan Desa Digital merupakan pekerjaan bertahap dan jangka waktu yang panjang sehingga keterlibatan berbagai aspek tentu sangat dibutuhkan dan sangat menjadi salah satu dorongan untuk suksesnya program desa digital tersebut.

Salah satunya dalam aspek ekonomi dan perkembangan dunia e-commerce saat ini semakin meningkat, beberapa kemudahan yang disuguhkannya membuat banyak orang menjadi tertarik (Anang Sugara dan Yudhi Dewantara, 2017). Hadirnya e-commerce ini mempersingkat waktu untuk

saling berhubungan, antara perusahaan dengan entitas bisnis lainnya. E-Commerce atau electronic commerce merupakan sebuah mekanisme dalam pengelolaan bisnis secara elektronik, fokusnya adalah pada transaksi bisnis jual beli individu melalui internet.

Salah satu pengimplementasian desa digital di Jawa Barat merupakan upaya pengembangan desa sehingga bisa berkolaborasi dalam pemanfaatan teknologi berkelanjutan dengan akhirnya adalah pengembangan desa dengan kolaborasi bersama e-commerce menjadi salah satu acuan terakhir agar menjadikan desa mandiri dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa tersebut.

Dalam data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik, Industri e-commerce di Indonesia dalam waktu 10 tahun terakhir jumlahnya meningkat hingga 17 persen. Jumlah pengguna e-commerce tercatat mencapai 26.7 juta. Pada tahun 2018 pertumbuhan e-commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Peluang ini mendorong agar adanya program desa digital menjadi sebuah sarana untuk pengembangan desa yang ada di Jawa Barat secara khususnya bisa mengembangkan potensi yang ada di desa dengan kolaborasi bersama teknologi dan internet.

Faktor lainnya sebagai pendorong dari optimalitas pembangunan dan pengimplemantasian desa digital ada upaya penyamaan persepsi dan komunikasi antara pemerintah provinsi bersama rakyatnya. Agar tidak ada kesenjangan antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Juga mengenai peningkatan kapasitas desa yang ada di Jawa Barat. Secara prinsipnya adanya program desa digital ini merupakan upaya pemerintah dalam mengembangkan desa dan mengembangbiakan usaha mikro kecil dan menengah yang menjamur di setiap desa.

Hal tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa sehingga masyarakat desa bisa memanfaatkan teknologi berkelanjutan agar bisa mengembangkan desa yang mereka tempati agar menjadi desa yang makin berkembang dan maju. Dalam upayanya pemerintah memberikan fasilitas sebagai stimulus agar masyarakat bisa bersama-sama memajukan desanya tersebut.

Dari aspek komunikasi, desa digital memiliki peran penting dalam proses interaksi, informasi dan lain sebagainya dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Harapan adanya desa digital ini menjadikan sebuah sarana serta alat yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam proses komunikasi serta berinteraksi bersama pemerintah ataupun sebaliknya. Sehingga jalur komunikasi

yang secara bias menjadi tersistematis sehingga menekan angka hoax, pemberitaan yang tidak jelas dan lain sebagainya.

Desa digital juga merupakan sarana untuk mengfilter informasi yang ada sehingga mengurangi pemberitaan yang kurang baik dan pemberitaan yang palsu sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar dan terverifikasi keabsahan beritanya.

Tentu bukan hanya berbicara pemberitaan saja, namun juga berkaitan dengan teknologi percepatan dari berbagai bidangnya, seperti bidang ekonomi, komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, percepatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu pula sebagai langkah untuk terus memajukan desa-desa yang sudah masuk kedalam desa digital, dengan demikian desa-desa bisa menunjukkan keunggulan yang ada di desa tersebut sehingga potensi yang ada di desa tersebut bisa diketahui oleh masyarakat secara luar di Indonesia maupun yang ada di Internasional karena jaringan tanpa batas ini bisa dimanfaatkan oleh desa.

Termasuk desa menjadi sebuah target utama untuk pembangunan yang mana bisa jadi pengembangan desa untuk kedepannya, karena desa menjadi target pengembangan pemerintah pusat, pemerintah wilayah dan sebagainya dalam rangka mengembangkan desa tersebut agar bisa maju dan berkembang sehingga desa bisa menjadi jantung peradaban dan bersaing dikemudian hari.

## **KESIMPULAN**

Proses interaksi komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan desa digital yang ada di Cibiru Wetan berjalan mengikuti struktur birokrasi organisasi pemerintahan yang ada, interaksi akan berlanjut ketika pemerintah desa atau aparatur desa telah membuat kesepakatan atau komitmen dalam rangka masuk dalam program desa digital. Interaksi ini juga dilakukan kepada beberapa pihak yang terlibat dan dilibatkan karena program desa digital merupakan program besar dan program yang banyak sektor yang terlibat serta dilibatkan.

Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan desa digital di Cibiru Wetan melakukan strategi komunikasi kekuatan secara kuantitas, dimana karena banyaknya yang terlibat dan dilibatkan dalam program desa digital ini menjadi sebuah kekuatan dalam mengimplementasikan program desa digital, namun desa sebuah catatan sesuai dengan aturan yang berlaku mengingat karena desa memiliki aturan dan perundang-undangan secara khusus mengenai desa.

Pengelolaan pesan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kaitan desa digital ini menggunakan pendekatan persuasi yang lebih mendorong serta mengajak kepada hal yang baik dalam rangka memajukan desa dan masyarakat yang ada di desa. Pendekatan ini juga secara garis besar mendorong aparatur desa lebih yakin dan lebih serius dalam mengawal program desa digital agar terwujudnya desa digital yang mandiri serta berdampak besar kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan teknologi internet yang kemajuan pada saat ini sangat pesat.

Pemilihan media yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya mewujudkan desa digital, pemerintah Provinsi Jawa Barat memanfaatkan media yang lebih dekat dengan penerima pesan. Media yang dekat dengan penerima pesan adalah media online yang mana secara penekanan desa digital adalah mengarahkan digitalisasi berbagai aspek terutama aspek informasi dan komunikasi sehingga lebih berat menitik beratkan kepada media online, namun tidak seutuhnya melepaskan media yang konvensional karena media konvensional ini merupakan media yang dekat juga dengan penerima pesan.

Citra yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kaitannya desa digital memiliki dasar yang jelas serta secara realitas terjadi sehingga citra yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat pada saat ini kemungkinan besar sangat mudah. Melihat dari latarbelakang bahwa program desa digital muncul karena ada beberapa permasalahan salah satu permasalahan informasi dan komunikasi, masalah dari sudut infrastruktur beberapa kawasan di Jawa Barat merupakan zona yang tidak terakses internet dan secara realitas bahwa pemimpin Jawa Barat (Ridwan Kamil) merupakan sosok yang diindentikkan dengan kepala daerah yang dekat dengan media online, serta dalam program dan pelaksanaan yang telah dia lakukan mengarah kepada digitalisasi sehingga citra yang dibangun adalah Jabar Digital.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. 2003. *Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bungin, Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Cangar, Hafied. 2006. *Pengantar Ilmu Komunikasi: Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cangar, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Denzin, N & Lincoln, Y. 2004. *Handbook of qualitative research*. California: Sage Publication.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Endra Wijaya, R. A. 2013 *Desa Digital: Peluang untuk Mengoptimalkan Penyebarluasan peraturan perundang-undangan di Indonesia*. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 no. 1 Januari 2013
- Everett M, Rogers, 2003. *Communication Technology: The New Media in Society*. New York: The Free Press
- Firmanzah. 2007. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Heryanto, Gun Gun dan Shulhan Rumaru. 2013. *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hurlock, B. Elisabeth. 1999. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga
- Krisyantono, 2014. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Malang: Kencana Prenada Media Grup.
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Littlejohn, W Stephen & Foss, A Karen. 2009. *Teori Komunikasi (Theoris of Human Communication)*, Edisi ke Sembilan. Jakarta: Salemba Humanika.
- Maswadi Rauf. 1993. *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Miles dan Hubberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Morrison. 2013. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy. 2001. *Metodologi Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2001. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nimmo. 1989. *Komunikasi Politik: Komunikasi, Pesan dan Media (Edisi Terhemah oleh Tjun Surjaman)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nimmo. 2010. *Komunikasi Politik (Komunikator, pesan dan Media)* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Piliang, Yasraf Amir. 2004. *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Postmetafisika*. Bandung: Jalasutra.
- Purba, Amir, dkk. 2006. *Pengantar Ilmu komunikasi*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

- Rakhmat, Jalaluddin. 2011. Psikologi Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rendy Alvaro, Emalia Octavia, (2019). Desa Digital: Potensi dan Tantangannya. Buletin APBN Vol. IV. Ed. 08, Mei 2019
- Sugiharto, I Bambang. 1996. Postmodernisme Tantangan bagi Filsafat. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sugiyono. 2013. Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis dan Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Widjaja, A. W. 2000. Ilmu Komunikasi. Jakarta: Bina Aksara.
- Yin, R. 2003. Case Study Research: Design and methods. (3 edition). California: Thousands Oaks
- Jurnal
- Alex Sobur. 2000. Paradigma Komunikasi Politik dalam Mewujudkan Masyarakat Madani. Makalah Juara Ke III, LKTI dosen Unisba.
- Atie Rachmiate. 2000. Sistem Komunikasi dan Informasi di Indonesia: Suatu Perubahan dan Tantangan Masa Depan. MediaTor. Vol. I No. 1
- Aziz Taufik Hirzi, 2011. Sentik dalam Musik dan Politik. MIMBAR, Vol. XXVII, No. 1:31-38.
- Djoko Waluyo. 2019. Pemahaman dan Praktik Komunikasi Politik Indonesia di Era Digital. Jurnal Diakom, Vol. 2 No. 2 Hal. 167
- Edy Suryanto, Endriatmo Soetarto, Sumardjo, Hartrisari Hardjomidjojo. 2015. Model Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi "Green Community" Mendukung Kota Hijau. Mimbar. Vol. 31, no 1:143-152.
- Endra Wijaya, R. A. (2013) Desa Digital: Peluang untuk Mengoptimalkan Penyebarluasan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 no. 1 Januari 2013
- Faud Gazali (2016). Penelitian Strategi Komunikasi Pemilihan Umum studi Kasus komunikasi pemasaran sosial dalam implementasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Sulawesi Tengah Kabupaten Parigi Moutong 2015.
- Ferry Darmawan. 2018. Modalitas Visual Komunikasi Politik Iklan Pilkada Kota Bandung 2018. Mediator. Vol. 11:56-65.
- Hidayat, Dedy N. 1999. "Paradigma dan Perkembangan Penelitian Komunikasi." Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Vol. 3, April
- Ica Wulansari. 2014. Artikulasi Komunikasi Politik Ridwan Kamil dalam Media Sosial Twitter. Jurnal UMN. Volume VI, Nomor 2.
- Ixsir Eliya, Ida Zulaeha 2017. Model Komunikasi Politik Ridwan Kamil di Media Sosial Instagram. Jurnal Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 4 (2), 215-223
- Muhammad Sufyan, Abdurahman. 2014. Twitter dan Ruang Publik Pemerintah Lokal yang Partisipatif (Telaah atas Komunikasi Politik Ridwan Kamil melalui Twitter). Jurnal: Penelitian Komunikasi dan Pembangunan. Vol. 15 No 2: 152-168.
- Mulyana, Budi. 2015. Budaya Politik Masyarakat Indonesia dalam Perspektif Pembangunan politik. Jurnal ASPIRASI, Vol. 5 No 2 Februari 2015 Hal 1-8.

- Munandar, H., & Suherman, M. (2016). Aktivitas Komunikasi Pemerintahan Ridwan Kamil di Media Sosial. Hubungan Masyarakat
- Nur Alfiyani. 2018. Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Politik. *Jurnal Potret Pemikiran*, Vol. 22, No. 2 Hal. 57.
- Raharjo dan Nafisah, 2006. Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi Dan Kinerja Karyawan. Volume 3, Nomor 2, Juli, Tahun 2006, Halaman 69
- Ramadhani. 2018. Daftar Program yang Diluncurkan Ridwan Kamil dalam 100 Hari Kerja sebagai Gubernur Jabar. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2018/12/17/11020831/14-daftar-program-yang-diluncurkanridwan-kamil-dalam-100-hari-kerja-ebagai?page=all>
- Rendy Alvaro, Emalia Octavia, (2019). Desa Digital: Potensi dan Tantangannya. *Buletin APBN* Vol. IV. Ed. 08, Mei 2019
- Reza Nusrullah. 2003. Komunikasi Politik: Kasus di Jawa Barat. *Mediator*, Vol 4. No 2.
- Rita Gani. 2005. Media Masa dalam Masyarakat Madani. *Mediator*. Vol. 6 No.1.
- Sutrisno & Akbar, 2018. Studi Implementasi Smart City di Kota Bandung. *Jurnal Sositologi*. 17 (2)
- Syarifuddin. 2015. Komunikasi Politik Bermedia dan Penggunaannya Oleh Masyarakat. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*. Vol. 19. No. 1 Hal. 47.